

Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Paskibraka Tingkat Provinsi Di Daerah Khusus Jakarta Tahun Anggaran 2024

Miftackul Huda¹, Dedeh Mariyani², Mutia Rahma³

^{1,2,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: miftackulhuda@gmail.com

Article History:

Received: 14 Juni 2026

Revised: 27 Juli 2026

Accepted: 06 Agustus 2026

Keywords:

Judge's
Considerations, Sentencing,
Narcotics

Abstract: *Narcotics crimes are a serious concern in the Indonesian criminal justice system due to their widespread impact on individual health and public safety. This study aims to analyze the judge's considerations in issuing sentences below the minimum limit stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the Salatiga District Court Decision No. 90/Pid.Sus/2019/Pn Slt. The method used is legal research using both a statutory and case-based approach. The results show that the judge considered several mitigating factors, including the relatively small amount of narcotics, the defendant's role as a non-major dealer, and the defendant's track record of prior involvement in similar crimes. The judge's considerations are an important instrument in realizing substantive justice and demonstrate the flexibility of the application of narcotics criminal law according to the facts of the trial.*

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh warga negara. Purwito (2016) menyatakan bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Unggul Ananda et al. (2022) menegaskan bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman dalam berbagai aktivitas kehidupan. Sari dan Najicha (2022) juga menjelaskan bahwa Pancasila harus menjwai setiap kegiatan dalam pembentukan negara, sementara Safitri dan Dewi (2021) menilai bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Hamja (2017) yang menegaskan bahwa tegaknya suatu bangsa sangat ditentukan oleh konsistensi masyarakatnya terhadap ideologi yang dianut.

Namun, perkembangan globalisasi menyebabkan nilai-nilai Pancasila mulai mengalami tantangan. Wijayanti Anggi et al. (2022) menyebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang dahulu kuat dalam kehidupan masyarakat kini perlahan mulai memudar. Adhari dan Dewi (2022) menjelaskan bahwa globalisasi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Cahyono (2018) menggambarkan globalisasi sebagai fenomena yang memiliki dua sisi, yaitu dapat memberikan manfaat tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Simanjuntak et al. (2021) menambahkan bahwa globalisasi dapat membawa pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah munculnya berbagai permasalahan terkait luntarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

sebagaimana dijelaskan oleh Adhari dan Dewi (2022). Nurhaidah dan Musa (2015) juga menyatakan bahwa arus globalisasi memengaruhi perkembangan budaya bangsa Indonesia. Akibatnya, menurut Novitasari dan Dewi (2022), sebagian generasi muda mulai meninggalkan budaya luhur dan terjerumus dalam pergaulan bebas yang menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini selaras dengan penelitian Surahman (2013) yang menjelaskan bahwa globalisasi menimbulkan akulturasi antara budaya barat dan budaya timur yang dapat memengaruhi nilai budaya bangsa.

Meskipun demikian, generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga jati diri bangsa. Khansa dan Dewi (2022) menyebut pemuda sebagai *agent of change*, *agent of development*, dan *agent of modernization* yang memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa. Adhari dan Dewi (2022) juga menegaskan bahwa pemuda memiliki pengaruh besar dalam menentukan keberhasilan suatu bangsa. Iswandi (2020) menyatakan bahwa pemuda merupakan penerus perjuangan bangsa sehingga diperlukan generasi muda yang memiliki semangat nasionalisme tinggi. Fransisca et al. (2024) menegaskan bahwa generasi muda merupakan aset penting bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, menurut Asyifa (2023), generasi muda perlu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar mampu membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Tanpa peran generasi muda, sebagaimana dikemukakan oleh Alvira et al. (2021), pembangunan bangsa akan mengalami kesulitan dan identitas nasional dapat memudar. Dalam hal ini, organisasi kepemudaan juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepemimpinan generasi muda sebagaimana dijelaskan oleh Sulaksono dan Pemana (2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya pengarusutamaan Pancasila melalui pembinaan ideologi kepada generasi muda secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Dalam regulasi tersebut, Paskibraka didefinisikan sebagai pelajar terbaik yang dipilih secara bertahap untuk melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera pusaka. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 menegaskan bahwa Program Paskibraka merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila dan pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, program ini meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila, pelaksanaan tugas lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka.

Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt. Direktur Penyelenggara Program Paskibraka, BPIP menemukan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan regulasi, salah satunya terkait pelibatan aktor kelembagaan dan koordinasi antar lembaga. Di Provinsi Daerah Khusus Jakarta misalnya, Badan Kesbangpol yang seharusnya bertindak sebagai panitia penyelenggara turut terlibat dalam proses penilaian calon Paskibraka, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip netralitas dan objektivitas sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Selain itu, dalam proses seleksi masih ditemukan daerah yang belum menggunakan aplikasi digital transparansi yang dikembangkan BPIP sehingga proses seleksi masih dilakukan secara konvensional dan kurang terintegrasi.

Permasalahan lain juga muncul dalam polemik penggunaan jilbab pada Paskibraka. Menurut pemberitaan Kompas.com (2024), Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa larangan berjilbab bagi anggota Paskibraka merupakan tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan Pancasila serta hak asasi manusia. Kompas.com (2024) juga mengutip

pernyataan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang menilai kebijakan tersebut tidak menghormati konstitusi. Sementara itu, Detik.com (2024) melaporkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menegaskan tidak ada larangan berjilbab, dan BPIP menjelaskan bahwa aturan keseragaman formasi tetap memberikan ruang bagi atribut keagamaan selama tidak mengganggu estetika formasi. Selain itu, masih terdapat permasalahan pada aspek pembinaan pasca kegiatan karena tidak semua alumni Paskibraka mendapatkan pembinaan lanjutan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi.

Berbagai dinamika tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan Program Paskibraka. William N. Dunn (2003) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan diperlukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan suatu kebijakan. Gedeona (2006) juga menyatakan bahwa evaluasi merupakan tahap akhir dari proses kebijakan, sedangkan Fadillah (2001) menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan publik. Sirajul Huda et al. (2021) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan representasi nasional. Supriyadi (2022) menyatakan bahwa Jakarta memiliki kompleksitas tata kelola yang tinggi karena memiliki hubungan vertikal yang kuat dengan pemerintah pusat. Selain itu, Utami (2018) menjelaskan bahwa Jakarta sebagai daerah otonom khusus memiliki fungsi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara. Tahun 2024 dipilih karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan Program Paskibraka oleh BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 sehingga sudah tersedia data pelaksanaan yang cukup untuk dianalisis secara komprehensif, sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho (2014). Selain itu, tahun 2024 juga merupakan tahun politik nasional yang berpotensi memengaruhi dinamika pelaksanaan program. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan penyelenggaraan Program Paskibraka tingkat provinsi di Daerah Khusus Jakarta Tahun Anggaran 2024.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan Program Paskibraka tingkat provinsi di Daerah Khusus Jakarta Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi peneliti yang lain. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Program Paskibraka tingkat provinsi di Daerah Khusus Jakarta Tahun Anggaran 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kebijakan berupa evaluasi kebijakan terapan dengan metode studi kasus kualitatif untuk memahami pelaksanaan Program Paskibraka tingkat Provinsi di Daerah Khusus Jakarta dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022. Metode studi kasus digunakan karena mampu menjelaskan fenomena kebijakan dalam konteks nyata sebagaimana dijelaskan oleh Yin (2014) dan Stake (1995), sehingga Program Paskibraka dipahami tidak hanya sebagai kegiatan seremonial tetapi juga sebagai media pembinaan ideologi Pancasila. Pendekatan kualitatif dipilih karena, menurut Denzin dan Lincoln (2018), menekankan pemaknaan dari sudut pandang pelaku, sedangkan Creswell (2013) menyatakan pendekatan ini tepat untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” kebijakan berjalan. Penelitian ini berlandaskan paradigma pragmatisme sebagaimana dijelaskan

Feilzer (2010). Dunn (2003; 2018) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan menyediakan informasi sistematis untuk pengambilan keputusan, dan Agus Dwiyanto (2008) menekankan pentingnya menilai kesesuaian program dengan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Kerangka konseptual penelitian juga menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003; 2018) untuk menilai enam aspek Program Paskibraka yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 dan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2022, yaitu pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka, pembinaan lanjutan, serta pembinaan aktivitas kepaskibrakaan. Evaluasi ini juga diarahkan untuk menilai dua tujuan utama kebijakan, yaitu menghasilkan Paskibraka yang Pancasilais serta mampu menyebarkan nilai-nilai Pancasila.

Penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2022, serta laporan pelaksanaan program dari BPIP dan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan BPIP sebagai pembuat kebijakan, panitia provinsi seperti Kesbangpol sebagai pelaksana kebijakan, serta DPPI dan Paskibraka sebagai penerima manfaat.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa teknik ini digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan relevan, sedangkan Miles dan Huberman (1994) menegaskan bahwa teknik ini sesuai untuk penelitian kualitatif karena informan dipilih berdasarkan posisi strategisnya. Penelitian melibatkan sembilan informan yang terdiri dari perwakilan BPIP, panitia provinsi, dan DPPI atau Purnapaskibraka. Pemilihan berbagai informan ini bertujuan melakukan triangulasi data sebagaimana prinsip evaluasi partisipatif menurut Patton (2008).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Abdussmad (2021) menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik tanya jawab untuk memperoleh informasi, sedangkan Sahir (2022) menyebutkan bahwa wawancara dapat dilakukan secara terstruktur. Observasi digunakan untuk mengamati fenomena secara langsung sebagaimana dijelaskan Abdussmad (2021), sedangkan Sahir (2022) menyebutkan bahwa observasi tidak terstruktur memungkinkan peneliti menyesuaikan pengamatan dengan kondisi lapangan. Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen resmi sebagaimana dijelaskan Arikunto (2002) dan Nugrahani (2014). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan audit proses penelitian sebagaimana dijelaskan Abdussmad (2021).

Analisis data dilakukan dengan membandingkan data empiris dengan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn untuk menilai keberhasilan Program Paskibraka dalam membentuk generasi muda berkarakter Pancasila. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan berupa penghentian program jika tidak efektif, perbaikan jika terdapat kekurangan, atau melanjutkan program jika berjalan dengan baik. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta Pusat sebagai lokasi utama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Paskibraka

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003) yang menekankan enam indikator evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, untuk menilai pelaksanaan Program Paskibraka di

tingkat Provinsi DKI Jakarta. Keenam indikator tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana program telah memenuhi prinsip-prinsip kebijakan publik yang baik. Dalam konteks pembinaan ideologi melalui program kepemudaan, Taliziduhu Ndraha (2011) menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan ideologis masyarakat melalui layanan publik, termasuk pembinaan karakter generasi muda. Pandangan ini sejalan dengan Sadu Wasistiono (2013) yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki fungsi membina masyarakat agar tetap berada dalam koridor ideologi negara. Berdasarkan kerangka tersebut, hasil wawancara terhadap sembilan narasumber yang terdiri dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan penerima manfaat Program Paskibraka dianalisis dengan membandingkan kriteria evaluasi dengan data empiris untuk menilai tingkat keberhasilan program. Analisis ini difokuskan pada enam aspek kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2021 dan diturunkan dalam Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2022.

Pembentukan Paskibraka

Pada aspek efektivitas, hasil wawancara dengan sembilan informan yang terdiri dari pejabat BPIP, panitia, psikolog, hingga peserta menunjukkan bahwa proses pembentukan Paskibraka dinilai efektif. Narasi dalam tabel wawancara menunjukkan kesamaan pandangan bahwa seleksi awal melalui *pretest* wawasan kebangsaan dan pendidikan pelatihan selama 14 hari dengan narasumber dari berbagai institusi seperti Lemhannas mampu memperkuat pemahaman nilai Pancasila, disiplin, dan karakter kebangsaan peserta. Program ini tidak hanya membentuk kemampuan teknis kepaskibrakaan, tetapi juga menanamkan karakter Pancasila secara sistematis.

Pada aspek efisiensi, tabel wawancara menunjukkan adanya dua pandangan. Sebagian informan menilai penggunaan sumber daya yang besar sebanding dengan hasil pembentukan karakter generasi muda dan merupakan investasi jangka panjang (*cost and benefit analysis*). Namun sebagian informan lain menilai dampak program masih terbatas karena kontribusi peserta lebih banyak dirasakan di lingkungan sekolah. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa efisiensi administratif belum optimal karena proses seleksi masih banyak dilakukan secara manual dan penggunaan aplikasi transparansi BPIP belum berjalan maksimal.

Pada aspek kecukupan, hasil wawancara menggambarkan bahwa proses pembentukan dinilai cukup memadai karena terdiri dari tiga tahap utama yaitu rekrutmen, pemusatan pendidikan dan pelatihan, serta pengukuhan. Materi pelatihan mencakup Pancasila, revolusi mental, kewarganegaraan, literasi digital, kepemimpinan, dan kepaskibrakaan. Pengucapan Ikrar Putra Indonesia saat pengukuhan juga menjadi bentuk komitmen peserta terhadap nilai Pancasila dan NKRI. Namun kelemahan yang muncul adalah belum semua peserta memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas pelatihan secara optimal.

Pada aspek pemerataan, narasi wawancara menunjukkan bahwa proses pembentukan berjalan secara adil dan inklusif. Informan menyatakan bahwa tidak terdapat diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, daerah, maupun agama. Semua peserta mengikuti tahapan seleksi, pelatihan, dan evaluasi yang sama. Meski demikian, penelitian mencatat bahwa potensi ketimpangan tetap perlu diantisipasi, misalnya kemungkinan dominasi peserta dari sekolah tertentu.

Pada aspek responsivitas, hasil wawancara menunjukkan bahwa program telah mempertimbangkan keberagaman latar belakang peserta, tetapi pelaksanaannya masih bersifat *top-down*. Kurikulum pelatihan relatif tetap dan belum banyak menyesuaikan dengan masukan peserta. Keterlibatan peserta dalam memberikan umpan balik terhadap program juga masih terbatas, sehingga responsivitas program dinilai belum optimal.

Pada aspek ketepatan, narasi wawancara menunjukkan bahwa program Paskibraka mampu menanamkan nilai disiplin, cinta tanah air, dan nasionalisme. Namun para informan juga menilai bahwa kegiatan ini bersifat sementara dan simbolik sehingga belum cukup jika dijadikan satu-satunya strategi pembinaan ideologi. Oleh karena itu, program Paskibraka dinilai lebih tepat sebagai bagian dari sistem pembinaan karakter yang lebih luas dan berkelanjutan, misalnya melalui integrasi dengan program pendidikan seperti *Profil Pelajar Pancasila*.

Pelaksanaan Tugas Paskibraka

Pada aspek efektivitas, narasi dalam tabel wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan menilai pelaksanaan tugas Paskibraka dalam upacara kenegaraan mampu merepresentasikan nilai-nilai Pancasila. Pengibaran bendera tidak hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai bentuk aktualisasi sikap disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan nasionalisme. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktik tugas yang mencerminkan lima sila Pancasila. Namun demikian, efektivitas internalisasi nilai masih terbatas karena kegiatan lebih terfokus pada momen seremonial, sehingga ruang penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari masih perlu diperluas. Hal ini sejalan dengan pandangan Nurhalimah dan Fitriani (2022) yang menekankan bahwa pendidikan nilai Pancasila perlu dilakukan secara kontekstual dan berbasis praktik nyata.

Pada aspek efisiensi, tabel wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dinilai efisien karena melibatkan jumlah peserta yang terbatas namun representatif, yaitu 76 anggota dari seluruh provinsi. Pelatihan yang terstruktur selama waktu relatif singkat menghasilkan dampak pembentukan karakter yang signifikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan sumber daya terbatas, program tetap mampu menghasilkan dampak simbolik dan edukatif yang luas, sehingga efisiensi program dinilai tinggi baik dari sisi anggaran, waktu, maupun pengelolaan pelatihan.

Pada aspek kecukupan, narasi tabel menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dalam dua momen kenegaraan utama dianggap cukup untuk menegaskan identitas peserta sebagai generasi Pancasila. Meskipun frekuensi tugas terbatas, intensitas pelatihan serta pembinaan lanjutan memberikan proses pembelajaran yang mendalam. Hal ini diperkuat oleh konsep *repetition theory* yang menjelaskan bahwa pengulangan nilai dan praktik secara konsisten dapat memperkuat pembentukan karakter. Dengan demikian, program dinilai cukup memadai dalam menanamkan nilai kebangsaan kepada peserta.

Pada aspek pemerataan, hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh anggota memperoleh tanggung jawab dan kesempatan yang setara dalam pelaksanaan tugas. Pelatihan, pembagian peran, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolektif tanpa diskriminasi latar belakang daerah maupun sosial. Kondisi ini mencerminkan penerapan nilai keadilan dan gotong royong yang menjadi inti dari Pancasila serta memperkuat solidaritas di antara peserta.

Pada aspek responsivitas, narasi tabel menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Paskibraka telah mampu mewakili semangat kebangsaan masyarakat, namun kontribusinya terhadap kehidupan sosial sehari-hari masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh sifat kegiatan yang temporer dan berfokus pada upacara kenegaraan. Selain itu, belum terdapat mekanisme *feedback* yang sistematis dari peserta untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebutuhan generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat responsivitas program masih perlu ditingkatkan.

Pada aspek ketepatan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Paskibraka memiliki nilai simbolik yang kuat dalam pembinaan karakter kebangsaan. Namun, para informan menilai bahwa pembentukan karakter yang paling signifikan justru terjadi selama proses pendidikan dan pelatihan, bukan semata-mata pada pelaksanaan upacara. Oleh karena itu, kegiatan Paskibraka dinilai belum sepenuhnya tepat jika dijadikan satu-satunya strategi internalisasi nilai Pancasila. Ketepatan program akan lebih optimal apabila pelaksanaan tugas

Paskibraکا disinergikan dengan pendekatan pembinaan karakter yang lebih berkelanjutan, seperti program *Profil Pelajar Pancasila* di lingkungan pendidikan.

Pengangkatan Purnapaskibraکا Duta Pancasila

Pada aspek efektivitas, narasi dalam tabel wawancara menunjukkan bahwa pengangkatan Purnapaskibraکا sebagai Duta Pancasila memberikan dampak simbolik yang positif. Penyematan pin Duta Pancasila dipandang sebagai bentuk pengakuan atas karakter nasionalisme dan nilai Pancasila yang dimiliki peserta. Namun, para informan juga menilai bahwa dampak substantif program terhadap masyarakat, khususnya kalangan pelajar, masih terbatas karena minimnya kegiatan lanjutan dan ruang aktualisasi bagi para Duta Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa program efektif secara simbolik, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif. Temuan ini sejalan dengan pandangan Wicaksono dan Prasetyo (2023) yang menekankan pentingnya kontinuitas kegiatan dalam pembinaan ideologi generasi muda.

Pada aspek efisiensi, tabel wawancara menunjukkan bahwa para informan belum dapat memberikan penilaian yang pasti karena program masih berada pada tahap awal implementasi. Struktur kelembagaan yang menangani Duta Pancasila baru terbentuk pada tahun 2025 sehingga belum tersedia indikator kinerja, data pembiayaan, maupun analisis *cost-effectiveness* yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi. Dengan demikian, efisiensi program belum dapat ditentukan secara objektif pada tahap ini.

Pada aspek kecukupan, narasi wawancara menunjukkan bahwa kurikulum pembinaan ideologis yang diberikan kepada Purnapaskibraکا telah mencakup materi penting seperti Pancasila, revolusi mental, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, serta literasi digital. Materi tersebut dinilai cukup dari sisi konseptual untuk membentuk pemahaman ideologis peserta. Namun, keterampilan praktis seperti komunikasi publik dan strategi penyebaran nilai Pancasila di masyarakat masih terbatas, sehingga kecukupan program lebih terlihat pada aspek konseptual daripada implementatif.

Pada aspek pemerataan, hasil wawancara menunjukkan bahwa secara kebijakan program ini bersifat inklusif karena seluruh Purnapaskibraکا memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari Duta Pancasila. Namun dalam praktiknya terdapat ketimpangan antarwilayah. Beberapa daerah belum dapat melaksanakan pengangkatan secara optimal karena keterbatasan struktur organisasi DPPI dan dukungan anggaran daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan program belum sepenuhnya tercapai.

Pada aspek responsivitas, narasi tabel menunjukkan bahwa program ini secara ideologis dirancang untuk menjawab kebutuhan pembinaan generasi muda sebagai figur teladan. Namun implementasinya masih bersifat *top-down* dan belum menyediakan ruang partisipatif bagi Purnapaskibraکا untuk menyampaikan aspirasi atau merancang kegiatan. Akibatnya, potensi mereka sebagai agen perubahan belum dimanfaatkan secara optimal.

Pada aspek ketepatan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan pengangkatan Duta Pancasila dinilai tepat secara filosofis karena memberikan pengakuan kepada generasi muda yang telah melalui proses pembinaan ideologis. Program ini juga sejalan dengan upaya pembangunan karakter bangsa melalui nilai Pancasila. Namun dalam implementasinya program masih bersifat simbolik karena belum disertai sistem kaderisasi dan pembinaan lanjutan yang terstruktur. Oleh karena itu, ketepatan program akan lebih optimal apabila disertai strategi pembinaan berkelanjutan yang memungkinkan para Duta Pancasila berperan aktif sebagai pemimpin muda di masyarakat.

Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila

Pada aspek efektivitas, narasi dalam tabel wawancara menunjukkan bahwa program ini masih berada pada tahap awal implementasi sehingga hasilnya belum terlihat secara signifikan. Para informan menjelaskan bahwa para Duta Pancasila belum banyak dilibatkan dalam kegiatan ideologis yang terstruktur dan perannya masih terbatas pada kegiatan internal atau insidental. Meskipun sebagian Purnapaskibraka mulai menyebarkan nilai Pancasila di lingkungan sekolah atau komunitas, belum terdapat sistem yang secara konsisten memfasilitasi peran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program belum optimal dan masih bergantung pada penguatan kebijakan serta perluasan ruang partisipasi bagi para Duta Pancasila.

Pada aspek efisiensi, narasi tabel menunjukkan bahwa sebagian besar informan menilai penggunaan sumber daya relatif sebanding dengan hasil yang dicapai. Program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembentukan karakter generasi muda. Meskipun dampak eksternal terhadap masyarakat luas belum terlihat secara signifikan, nilai-nilai Pancasila telah mulai terinternalisasi pada individu Purnapaskibraka dan lingkungan terdekat mereka. Dengan demikian, efisiensi program dinilai proporsional, terutama dalam konteks pembangunan karakter ideologis.

Pada aspek kecukupan, hasil wawancara menunjukkan bahwa program telah memberikan bekal awal berupa pelatihan ideologi kebangsaan, wawasan Pancasila, dan revolusi mental. Para informan menilai bahwa dukungan awal tersebut cukup untuk membangun fondasi kaderisasi ideologi generasi muda. Namun karena program masih berada pada tahap awal, dampak luas di masyarakat belum terlihat. Program ini dinilai memadai sebagai langkah strategis jangka panjang menuju pembangunan karakter generasi muda dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045.

Pada aspek pemerataan, narasi tabel menunjukkan bahwa kesempatan menjalankan peran sebagai Duta Pancasila belum sepenuhnya merata. Sebagian Purnapaskibraka memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan pembinaan atau forum kebangsaan, sementara sebagian lainnya belum terfasilitasi secara optimal. Hasil observasi dan analisis dokumen juga menunjukkan bahwa proses pelantikan dan pembinaan DPPI di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, belum berjalan secara sistematis sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022. Kondisi ini menyebabkan distribusi kesempatan dan peran masih terbatas.

Pada aspek responsivitas, narasi wawancara menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang kompleks. Kegiatan yang dilakukan masih bersifat simbolik dan belum banyak menysasar komunitas masyarakat secara langsung. Selain itu, belum terdapat mekanisme *feedback* yang memungkinkan daerah atau peserta memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas program masih relatif rendah dan memerlukan pendekatan yang lebih adaptif serta kontekstual.

Pada aspek ketepatan, hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuan kebijakan pengangkatan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila dinilai tepat karena menysasar generasi muda sebagai figur teladan dalam penyebaran nilai kebangsaan. Program ini dipandang relevan dengan kebutuhan pembangunan karakter bangsa melalui kaderisasi pemuda. Namun demikian, agar ketepatan kebijakan benar-benar tercapai, diperlukan penguatan implementasi yang berkelanjutan dan ruang peran yang lebih nyata bagi para Duta Pancasila di masyarakat, sehingga program tidak berhenti pada tataran simbolik tetapi mampu menghasilkan dampak sosial yang lebih luas.

Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila

Pada aspek efektivitas, narasi tabel menunjukkan bahwa pembinaan lanjutan telah dirancang secara strategis oleh BPIP melalui penyusunan modul dan kerangka pembinaan ideologis. Namun

implementasinya belum berjalan optimal di seluruh daerah. Beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, belum menjalankan pembinaan secara terstruktur karena kelembagaan DPPI belum aktif. Akibatnya, sebagian Purnapaskibraka tidak memperoleh kesinambungan penguatan nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program belum tercapai secara menyeluruh karena pelaksanaannya masih timpang antar daerah.

Pada aspek efisiensi, narasi tabel memperlihatkan bahwa BPPI telah berupaya meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi pembinaan, seperti penggunaan modul daring dan pelatihan berbasis *platform* digital. Upaya ini bertujuan mengurangi biaya logistik pelatihan tatap muka. Namun pada tingkat daerah efisiensi belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta keterlibatan peserta yang belum merata. Dengan demikian efisiensi program baru tercapai secara parsial, terutama pada tingkat pusat.

Pada aspek kecukupan, hasil wawancara menunjukkan bahwa materi pembinaan telah mencakup nilai Pancasila, etika publik, nasionalisme, dan kepemimpinan berbasis ideologi bangsa. Dari sisi substansi, materi tersebut dinilai cukup untuk membentuk karakter kepemimpinan Pancasila. Namun secara implementatif kecukupan belum terpenuhi karena pembinaan tidak dilakukan secara rutin dan tidak menjangkau seluruh Purnapaskibraka. Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa kegiatan pasca pelantikan sering kali tidak berlanjut, sehingga pembinaan ideologis masih bersifat terbatas.

Pada aspek pemerataan, narasi tabel menunjukkan bahwa pembinaan lanjutan belum terdistribusi secara merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah belum dapat menyelenggarakan pembinaan karena kelembagaan DPPI belum aktif atau belum tersedia sistem pendataan yang baik. Akibatnya hanya sebagian Purnapaskibraka yang memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan lanjutan, sedangkan lainnya tidak mendapatkan akses yang sama.

Pada aspek responsivitas, hasil wawancara menunjukkan bahwa program telah mencoba menyesuaikan metode pembinaan melalui pendekatan *hybrid* yang menggabungkan pelatihan daring dan luring. Namun belum terdapat mekanisme *feedback* atau forum resmi yang memungkinkan Purnapaskibraka menyampaikan aspirasi, kebutuhan, atau masukan terhadap program. Ketiadaan kanal komunikasi tersebut menyebabkan program masih bersifat *top-down* dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan peserta maupun dinamika generasi muda.

Pada aspek ketepatan, narasi tabel menunjukkan bahwa tujuan kebijakan pembinaan lanjutan dinilai tepat karena diarahkan pada regenerasi kader ideologis bangsa melalui pembinaan pemuda yang telah melalui proses seleksi dan pelatihan kebangsaan. Namun pelaksanaannya belum konsisten antar wilayah sehingga tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Dengan demikian, program ini tepat dari sisi desain dan tujuan kebijakan, tetapi masih memerlukan penguatan implementasi agar pembinaan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata.

Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan Dan Purnapaskibraka.

Pada aspek efektivitas, narasi tabel menunjukkan bahwa pembinaan pada tahap pelatihan nasional dinilai cukup berhasil dalam menanamkan nilai disiplin, nasionalisme, dan tanggung jawab. Proses pelatihan intensif mampu membentuk karakter peserta selama masa pendidikan berlangsung. Namun efektivitas tersebut tidak berlanjut setelah pelantikan karena tidak adanya program pembinaan lanjutan yang terorganisasi di banyak daerah. Ketiadaan struktur kelembagaan aktif seperti DPPI menyebabkan internalisasi nilai Pancasila hanya terjadi pada tahap awal dan tidak berkembang secara berkelanjutan.

Pada aspek efisiensi, hasil wawancara dalam tabel menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan pada tingkat nasional relatif efisien karena pelatihan dirancang padat dan terarah. Meskipun demikian, efisiensi tidak tercapai secara menyeluruh di tingkat daerah. Keterbatasan anggaran,

sumber daya manusia, serta kurangnya instruksi operasional menyebabkan pembinaan lanjutan tidak dilaksanakan secara konsisten. Akibatnya, potensi Purnapaskibraka sebagai agen pembina nilai kebangsaan belum dimanfaatkan secara optimal.

Pada aspek kecukupan, narasi tabel memperlihatkan bahwa secara substansi materi pembinaan sudah memadai karena mencakup nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, revolusi mental, dan kepemimpinan. Namun metode penyampaian dinilai masih terlalu formal dan *top-down*, sehingga kurang sesuai dengan karakter generasi muda yang membutuhkan pendekatan lebih partisipatif. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pembinaan lanjutan menyebabkan kecukupan program hanya terpenuhi dari sisi konten, tetapi belum dari sisi metode dan kesinambungan pelaksanaan.

Pada aspek pemerataan, hasil wawancara menunjukkan adanya ketimpangan pelaksanaan pembinaan antarwilayah. Beberapa daerah yang memiliki struktur DPPI aktif masih dapat menyelenggarakan kegiatan lanjutan, sedangkan daerah lain tidak memiliki program pembinaan pasca pelatihan. Kondisi ini menyebabkan tidak semua Purnapaskibraka memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pembinaan lanjutan, sehingga prinsip pemerataan program belum tercapai.

Pada aspek responsivitas, narasi tabel menunjukkan bahwa penyelenggara mulai menyadari pentingnya pembinaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun hingga saat ini belum terdapat *database* aspirasi atau pemetaan kebutuhan peserta yang sistematis. Metode pembinaan masih bersifat seragam dan kurang mempertimbangkan konteks sosial maupun kebutuhan lokal peserta. Hal ini menyebabkan program belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika generasi muda.

Pada aspek ketepatan, hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuan kebijakan pembinaan dinilai tepat karena diarahkan pada pembentukan kader muda berkarakter Pancasila sebagai bagian dari regenerasi pemimpin bangsa. Namun ketepatan tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam praktik karena pelaksanaan program tidak dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten di berbagai daerah. Akibatnya, pembinaan belum mampu menghasilkan dampak ideologis yang transformatif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka memiliki arah kebijakan yang tepat secara ideologis, namun implementasinya belum berjalan optimal. Ketidakterpaduan koordinasi antar lembaga serta kurangnya kesinambungan program menyebabkan tujuan pembinaan karakter Pancasila belum sepenuhnya terwujud secara berkelanjutan di lapangan.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program paskibraka

Dari sisi pendukung, program ini memiliki desain kebijakan yang relatif terstruktur karena didasarkan pada regulasi nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 dan berbagai peraturan BPIP. Kerangka regulasi tersebut mengatur tahapan program secara sistematis, mulai dari seleksi peserta, pelatihan, pelaksanaan tugas, pengangkatan sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila, hingga pembinaan lanjutan. Struktur regulasi yang jelas ini memberikan pedoman yang kuat bagi pelaksanaan program di berbagai tingkatan pemerintahan. Selain itu, materi ideologis yang diberikan kepada peserta dirancang secara tematik dengan penekanan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta pembentukan karakter kepemimpinan. Proses pelatihan yang berlangsung selama empat belas hari juga dinilai mampu menciptakan ruang internalisasi nilai kebangsaan secara intensif. Faktor pendukung lainnya adalah keterlibatan pelatih dan narasumber yang kompeten serta memiliki integritas ideologis, sehingga mampu memperkuat kualitas pembinaan karakter peserta. Di samping itu, penggunaan simbol-simbol kenegaraan dalam proses pelaksanaan tugas maupun pelantikan juga memiliki

.....

makna penting karena mampu menumbuhkan rasa bangga, identitas kebangsaan, serta komitmen nasionalisme di kalangan peserta.

Namun demikian, berbagai faktor penghambat masih ditemukan dalam implementasi program di lapangan. Salah satu kendala utama adalah masih kuatnya pola lama dalam praktik birokrasi yang kurang adaptif terhadap regulasi baru. Sebagian panitia daerah masih menerapkan mekanisme seleksi dan pembinaan berdasarkan kebiasaan sebelumnya, sehingga inovasi kebijakan yang diharapkan dari regulasi baru belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, terdapat ketimpangan kelembagaan di tingkat daerah, terutama terkait belum aktifnya struktur organisasi seperti DPPI di beberapa wilayah. Kondisi ini menyebabkan pembinaan lanjutan terhadap Purnapaskibraka tidak berjalan secara merata dan menciptakan kesenjangan dalam implementasi program. Kendala lain juga terlihat pada aspek digitalisasi, di mana penggunaan aplikasi seperti Transparansi dan Srikandi sebagai sarana administrasi dan pengelolaan program belum berjalan optimal. Banyak sekolah maupun panitia masih menggunakan metode manual karena keterbatasan pelatihan teknis, infrastruktur teknologi, dan pemahaman sistem.

Selain masalah teknis, keterbatasan ruang aktualisasi bagi Purnapaskibraka Duta Pancasila juga menjadi hambatan penting. Setelah proses pelantikan, tidak terdapat program lanjutan yang secara sistematis memberikan ruang bagi para PDP untuk menjalankan peran mereka sebagai agen penyebar nilai Pancasila di masyarakat. Akibatnya, status sebagai Duta Pancasila cenderung bersifat simbolik dan belum menghasilkan dampak sosial yang nyata. Permasalahan ini diperkuat oleh minimnya forum komunikasi partisipatif antara peserta dan penyelenggara program. Ketidadaan mekanisme *feedback* menyebabkan aspirasi peserta tidak terakomodasi dalam perumusan kebijakan lanjutan. Di sisi lain, program juga belum didukung oleh sistem *monitoring* dan evaluasi yang terstruktur, sehingga sulit memperoleh data yang valid untuk menilai capaian program secara berkelanjutan. Kondisi ini menyulitkan upaya perbaikan kebijakan berbasis bukti atau *evidence-based policy*. Faktor penghambat lainnya berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, termasuk keterbatasan pelatih, fasilitas teknologi, serta pemahaman terhadap regulasi program.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Program Paskibraka tidak hanya ditentukan oleh kekuatan desain kebijakan secara normatif, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem digitalisasi, serta pembentukan ruang partisipatif yang memungkinkan peserta terlibat secara aktif dalam pengembangan program. Langkah-langkah tersebut menjadi kebutuhan strategis agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan dampak ideologis yang lebih luas bagi generasi muda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan Program Paskibraka tingkat provinsi di Daerah Khusus Jakarta Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum program ini telah menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dalam membentuk karakter generasi muda yang berjiwa Pancasila, terutama pada tahap pembentukan peserta dan pelaksanaan tugas upacara kenegaraan. Tahapan pembentukan Paskibraka dinilai efektif, efisien, cukup memadai, serta relatif adil dalam proses pelaksanaannya, karena mampu membentuk karakter disiplin, nasionalisme, dan tanggung jawab pada peserta. Namun demikian, aspek *responsivitas* dan *ketepatan* masih belum optimal karena program ini belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan generasi muda serta belum cukup kuat jika dijadikan satu-satunya strategi internalisasi nilai Pancasila.

Pada tahap pelaksanaan tugas Paskibraka, kegiatan pengibaran bendera dalam upacara kenegaraan terbukti efektif dalam merepresentasikan nilai-nilai Pancasila baik secara simbolik maupun substantif. Program ini juga dinilai efisien, cukup memadai, serta berjalan secara relatif merata dalam pelaksanaan tugasnya. Meskipun demikian, aspek *responsivitas* masih terbatas karena kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat seremonial dan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Selain itu, meskipun program memiliki nilai strategis dalam pembentukan karakter kebangsaan, pendekatan tersebut belum sepenuhnya tepat jika berdiri sendiri tanpa dukungan program pendidikan karakter lainnya yang bersifat lebih berkelanjutan.

Dalam tahap pengangkatan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila, program ini berhasil memberikan pengakuan simbolik terhadap peserta yang telah menunjukkan karakter nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan. Namun dari sisi implementasi, program ini masih berada pada tahap awal sehingga efektivitas dan efisiensinya belum dapat diukur secara menyeluruh. Kurikulum dan pembekalan ideologis dinilai cukup memadai secara konseptual, tetapi kesiapan praktis peserta untuk menjalankan peran di masyarakat masih terbatas. Selain itu, pelaksanaan pengangkatan belum merata di seluruh daerah, meskipun secara desain kebijakan program ini dinilai responsif terhadap kebutuhan ideologis masyarakat dan tepat dalam kerangka filosofi kebijakan.

Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila juga belum sepenuhnya efektif karena belum terdapat ruang partisipasi yang cukup bagi para PDP untuk menjalankan peran mereka secara nyata dalam masyarakat. Meskipun penggunaan sumber daya dinilai relatif efisien dan pembekalan awal sudah cukup untuk membangun fondasi karakter kebangsaan, pelaksanaan program ini belum merata dan masih kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta aspirasi daerah. Namun demikian, secara konseptual program ini memiliki sasaran yang tepat karena bertujuan membentuk figur pemuda yang Pancasilais melalui proses seleksi dan pembinaan ideologis yang sistematis.

Pada tahap pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, program ini memiliki desain strategis untuk memperkuat karakter Pancasilais secara berkelanjutan, tetapi implementasinya belum berjalan efektif di seluruh wilayah. Efisiensi program juga belum tercapai secara menyeluruh karena distribusi sumber daya dan dukungan teknis masih belum merata. Meskipun materi pembinaan dinilai cukup kuat secara substansi, pelaksanaannya belum menjangkau seluruh PDP secara konsisten sehingga manfaatnya belum dirasakan secara luas. Selain itu, program pembinaan ini juga belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan peserta karena belum tersedia mekanisme partisipatif yang memungkinkan aspirasi PDP terakomodasi dalam pengembangan program.

Sementara itu, pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka menunjukkan bahwa pelatihan pada tingkat pusat relatif efektif dan efisien dalam membentuk karakter peserta. Namun keberhasilan tersebut tidak berlanjut secara optimal di tingkat daerah karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta tidak adanya program lanjutan yang terstruktur. Konten pembinaan dinilai cukup kuat dalam membentuk karakter Pancasilais, tetapi metode pelatihannya masih kurang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda. Selain itu, pelaksanaan program belum merata di seluruh wilayah dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan peserta secara kontekstual. Meskipun demikian, secara filosofis dan ideologis program ini memiliki arah kebijakan yang tepat karena bertujuan memperkuat identitas kebangsaan generasi muda melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, namun ketidakteraturan dan kurangnya kesinambungan implementasi menyebabkan tujuan tersebut belum terealisasi secara optimal di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: Syahadah Press.
- Agus Dwiyanto. (2008). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2022). *Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Paskibraka*. Jakarta: BPIP.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2022). *Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Paskibraka*. Jakarta: BPIP.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach*. New York: Routledge.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Nurhalimah, & Fitriani. (2022). Pendidikan nilai Pancasila berbasis kontekstual dalam pembentukan karakter generasi muda. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2021 tentang Program Paskibraka*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, S. (2013). *Ilmu pemerintahan*. Bandung: Fokusmedia.
- Wicaksono, & Prasetyo. (2023). Kontinuitas pembinaan ideologi generasi muda melalui program kepemudaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.
-